

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai wujud ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi (Jimly Asshiddiqie, 115-166). Transisi menuju era demokrasi politik secara stabil dan damai. Adanya transisi secara damai, maka memberikan penekanan kepada elit politik beserta lembaganya dan masyarakat sebagai era pertahanan untuk menuju perubahan politik dengan munculnya pemilu bebas yang diikuti oleh banyak partai.

Seiring dengan konstalasi politik di era demokrasi yang legitimate sebagai harapan dari ending transisi, semakin dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelaksanaan pemilu sejak tahun 2004 dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2005 secara langsung. Sebagai konsekuensi logis perubahan atmosfer politik tersebut maka dinamika dan intensitas artikulasi politik makin tampak di tengah ranah kehidupan sosial politik. Setidaknya, masyarakat diterapkan wacana dan partisipasi politik tidak hanya lima tahun sekali saat pemilu saja. Tetapi juga, disamakan oleh pemilu kepala daerah baik pada tingkat provinsi maupun Kabupaten atau Kota.

Dalam Buku Gelombang Demokrasi Ketiga, Demokrasi akan memunculkan politik dimana politik menurut Miriam Budiharjo (1981), Politik sendiri yaitu bermacam macam kegiatan dari suatu sistem politik (Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan, dari sistem Indonesia dan melaksanakan tujuan-

tujuan itu. Mengenai politik itu mengandung konotasi arti kebijakan kekuasaan, negara, konflik, pembagian, keadilan kesejahteraan, rakyat. Politik diidentikkan dengan perbuatan mengendalikan negara saja. Akan tetapi sekarang, politik bukan lagi hal-hal yang berkaitan dengan negara dan pemerintah saja. Sebab konflik, keputusan dan masalah-masalah umum sering menjadi atau dijadikan konflik politik yang menyangkut masyarakat di dalamnya, dan adanya tujuan politik yang berbeda-beda akan muncul beberapa partai politik yang menyatukan visi misi masyarakat.

Dengan mengenalnya masyarakat terhadap partai politik membuat rakyat melakukan partisipasi politik yang setiap warga negara itu tidak bisa dilaksanakan dengan lancar dan otomatis, disebabkan oleh kompleksnya struktur ke masyarakat dan struktur politik dengan aturan-aturan main yang sering menjarah, menekan, dan memaksa, sehingga banyak orang tidak tahu akan hak-hak politiknya (Kartono, 2009: 125). Kemudian menurut *McClosky (1990)* bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung dan tidak langsung (Budiarjo: 1999), sehingga partisipasi yang masuk dalam sistem politik yang menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan tertentu.

Partisipasinya dalam kegiatan yang berkaitan dengan warga negara pribadi (*private citizen*) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah oleh karenanya selalu diwarnai dengan aktifitas politik untuk mengatur aktifitas negara, dan melaksanakan tujuan negara sebaik-baiknya, sehingga permasalahan politik sesungguhnya lebih terfokus pada “kekuasaan” tanpa

mengecilkan arti penting atau signifikansi dari semangat demokrasi masyarakat dengan adanya pemilihan umum dengan mengambil suara masyarakat, berbagai dampak negatif pun muncul seperti ambisi yang berlebihan terhadap kekuasaan sehingga cenderung menghalalkan segala cara.

Tabel 1.1 Data Pemilihan Tetap 2009 Desa Wanar Kecamatan Pucuk

Jenis Pemilu	Yang Memiliki Hak Pilih			Yang Memilih		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pemilihan Kepala Desa	1728	2597	4325	1290	1825	3115
Pemilihan Bupati	1810	2835	4645	1259	2158	3417
Pemilihan Gubernur	1459	1521	2980	1214	1268	2482
Pemilihan Legislatif	2921	2917	5838	1895	1460	3355
Pemilihan Presiden	2560	2728	5288	1958	1675	3633

Sumber: Balai Desa Wanar 2014

Tabel 1.2 Data Pemilihan Tetap 2014 Desa Wanar Kecamatan Pucuk

Jenis Pemilu	Yang Memiliki Hak Pilih			Yang Memilih		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pemilihan Kepala Desa	1864	2796	4660	1305	1957	3262
Pemilihan Bupati	1824	2757	4581	1277	1916	3193
Pemilihan Gubernur	1503	1457	2960	2321	2341	4662
Pemilihan Legislatif	3028	2932	5960	2721	2246	4967
Pemilihan Presiden	2611	2611	5222	1726	1698	3424

Sumber: Balai Desa Wanar 2014

Mengenai data partisipasi politik yang dilakukan masyarakat Desa Wanar dalam keadaan Desanya yang sangat erat rasa solidaritasnya, meskipun ada perbedaan aliran Agama, masyarakat sangat mengutamakan rasa persaudaraan tanpa membenci tetapi sangat menghargai perbedaan. Berangkat dari rasa solidaritas yang sangat kental, masyarakat Desa sangat kompak mengikuti sosialisasi partai-partai baik dari kalangan apapun itu, PNS, tokoh Agama, perangkat Dusun atau Desa, Petani, dan Pengusaha semua sangat menghargai tanpa adanya perbedaan status, sehingga rakyat mengikuti suatu kegiatan apapun itu dengan rasa menghargai persaudaraan. Dari rasa itu mulai di masukin sosialisasi partai-partai lewat jalan organisasi yang ada di Desa. Calon Legislatif, mulai melakukan kegiatan atas nama organisasi tetapi didalamnya mensosialisasikan Partai agar rakyat memilih partai tersebut. Banyak janji-janji yang di sampaikan dan banyak kontribusi yang di berikan calon Legislatif dalam menarik perhatian masyarakat dalam ikut serta mengikuti partisipasi politik yang ada di Desa.

Dalam pemilihan Legislatif (PILEG) 2014, rakyat tentu tak lepas dari sistem perpolitikan yang berkembang. Politik di Indonesia yang mulai tidak terkontrol oleh suatu sistem yang mulai banyak kecurangan. Partai-partai mulai mensosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat yang memberi gambaran, sehingga mulai banyak rakyat sedikit banyak mengetahui perpolitikan, dari itu timbul partisipasi dari kalangan pemilih pemula, maupun pemilih tetap. Yang partisipasinya luar biasa sampai-sampai dari kalangan orang lansia di paksa untuk memilih untuk mendapatkan suara rakyat yang maksimal.

Partisipasi politik mulai meningkat di pelosok Desa sehingga peneliti tertarik dengan banyaknya masyarakat Desa berpartisipasi dalam PILEG 2014 yang berada di Desa Wanar. Atas dasar latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul “ **Analisa Perilaku Masyarakat Pemilih Politik Desa Wanar Pucuk Kabupaten Lamongan dalam Pemilihan Legislatif (PILEG) 2014**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat ditarik masalah dan persoalan penting tentang adanya Analisa perilaku pemilih politik masyarakat Desa Wanar Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan:

Bagaimana perilaku masyarakat pemilih politik Desa Wanar Pucuk Kabupaten Lamongan dalam pemilihan Legislatif (PILEG) 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian-uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

Mengetahui sejauh mana perilaku masyarakat pemilih politik Desa Wanar Pucuk Kabupaten Lamongan dalam Pemilihan Legislatif (PILEG) 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya literature ilmu politik yang telah ada, khususnya tentang perilaku politik masyarakat.
2. Berguna untuk menegembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan dari penelitian yang dilakukan bisa menjadikan acuan bagi pihak masyarakat Desa Wanar dalam pemilihan pemimpin yang di adakan oleh pemerintah, agar perilaku pemilihan tersebut bisa berjalan sesuai kondisinya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah, seperti dalam menyusun suatu kebijakan di dalam masyarakat.
3. Sebagai bahan rujuk kepada masyarakat, pelaku-pelaku politik dan tentunya masyarakat yang tidak mempunyai ilmu dasar politik. Diharapkan, penelitian ini dari semua elemen yang ada dalam masyarakat dapat mengetahui tentang perilaku politik.

1.5 Penelitian Terdahulu (originalitas penelitian)

Penelitian ini akan menemukan dan mendeskripsikan mengenai fenomena perilaku pemilih politik masyarakat Desa Wanar Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan dalam pemilihan Legislatif (PILEG) 2014. Konsep dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk perilaku masyarakat dalam berpartisipasi PILEG 2014.

Ada beberapa penulis baik itu dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau tulisan ilmiah lain yang terbukti memiliki nilai relevan dengan topik masalah yang diangkat yang ditentukan mengenai perilaku politik.

Penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistya Kurniawati (2012) yang berjudul “*Analisa Perilaku Pemilih Politik Masyarakat Desa Polagan Kabupaten Pamekasan dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2010*”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu kepemimpinan kepala Desa yang masih ada faktor kekeluargaan dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskripsi, dengan melalui pendekatan kepada masyarakat yang dijadikan informan.

Dalam penelitian tersebut menerapkan kepemimpinan di suatu pemerintah, baik itu tingkat pemerintahan desa sampai dengan yang tertinggi, keberhasilan merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai. Salah satu faktor yang menentukan hal ini adalah bagaimana seorang pemimpin bisa memimpin didesa yang dipimpinnya. Karena dalam kepemimpinannya akan selalu dihadapkan pada permasalahan bagaimana dia dapat memimpin dengan tepat dan berhasil.

Penelitian ini juga pernah diteliti oleh Cice Verawati R. L. yang berjudul *“Perilaku Pemilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 Di Kabupaten Kolaka Utara”* penelitian ini di latar belakang oleh politik perempuan, dalam hal ini pilihan politik perempuan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik tersebut. Pilihan politik perempuan dimaksudkan sebagai pilihan atau pemberian suara terhadap pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Kolaka Utara. Selain itu, pilihan politik mencakup informasi dan pengetahuan seputar pemilihan yang diterima perempuan dan menjadi landasan ketika menggunakan hak pilihnya.

Dalam pembahasan tentang perilaku politik perempuan dalam hal ini pilihan politik perempuan, kerangka konseptual dimaksud teori pilihan rasional serta pendekatan sosiologi dan psikologi dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik perempuan. Pada pemilihan legislatif di kota kolaka Utara 2009, pemilih perempuan memiliki konteks yang berbeda-beda. Tiap perempuan memiliki lingkungan social dan proses sosialisasi yang berbeda-beda pula. Dalam sosialisasi lingkungan social perempuan, terjadi penyerapan nilai-nilai dan informasi yang dipengaruhi bangunan pengetahuan.

Kemudian Penelitian ini juga sudah pernah diteliti oleh Fera Harianti Nasution tentang *“Perilaku Pemilih pada pemilihan Gubernur Utara Secara Langsung di Kabupaten Labuan Batu (Studi Kasus di Kelurahan Bakaran Batu, Kabupaten Labuhan Batu)”* Departemen Ilmu Politik fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan 2009 dalam pemilihan Legislatif 2004, sebaran suara pemilihan di kabupaten labuhan batu secara dominan masih berada pada partai

politik yang sudah besar dan mapan serta memiliki dukungan pemilih yang besar. Sebaran suara pemilih tersebut, menunjukkan perubahan yang cukup unik dalam pilkada secara langsung. Pasangan yang diusung dari partai-partai terbesar yang memenangkan dalam pemilihan legislatif tahun 2004 yang masyarakatnya tidak terpengaruh oleh sebuah isu, Agama, Ras, dan Politik Uang.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah para pemilih pada pilkada secara langsung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan rumus slovin, responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 97 responden. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pilkada secara langsung di kabupaten labuhan batu kelurahan Bakaran Batu. Terdapat hubungan yang cukup kuat antara orientasi kandidat dan orientasi isu dengan perilaku politik.

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang berupa sebuah skripsi adapun perbedaannya. Dari penelitian-penelitian sebelumnya, belum menjelaskan sebuah pendidikan sangat berpengaruh dengan apa yang masyarakat putuskan dalam memilih pemimpin, figure seorang pemimpin tidak lagi dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai pemimpin dan keberadaan partai tidak lagi sebagai alat untuk memobilisasi masyarakat. Kelompok-kelompok tertentu dan orang yang mempunyai kekuasaan yang sangat berperan dalam memobilisasi.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Teori Tindakan Sosiologi Politik Max Weber

Mempelajari masalah hubungan antara manusia bahwa perilaku manusia umumnya dipengaruhi oleh kelompok tempat ia terlibat sebagai anggota dan oleh

interaksi yang terjadi dalam kelompok. Sedangkan politik adalah hubungan antara manusia yang lebih mengfokuskan dalam ranah kekuasaan atau analisis perilaku individu atau kelompok.

Diantara sosiologi dan politik mempunyai kesinambungan untuk mempelajari suatu masyarakat yang hidup di negara. Baik sosiologi maupun ilmu politik mempelajari Negara dan konsep sekaligus yaitu sosiologi dan politik. Secara praktis sosiologi politik adalah studi mengenai kekuasaan dan analisis kekuasaan dengan menggunakan ilmu sosiologi. Sosiologi politik juga sebagai subjek area yang mempelajari alur politik dan masyarakat, antara struktur-struktur sosial dan struktur-struktur politik dan antara tingkah laku sosial dengan tingkah laku politik (Miriam Bidiarjo, 2008: 29).

Perilaku politik (*Political Behavior*) dapat dinyatakan sebagai keseluruhan tingkah laku, politik dan warga Negara yang telah saling memiliki hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara lembaga pemerintah dan antara kelompok masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Perilaku politik merupakan suatu proses dimana, setiap individu berhak dalam setiap pengambilan keputusan untuk memberikan suara pada setiap calon pemimpin untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Tindakan tersebut meliputi setiap jenis perilaku manusia yang berorientasikan kepada perilaku orang lain (Upe, 2008: 89).

Penelitian tentang perilaku pemilih atau suatu partisipasi yang cukup relevan digunakan tindakan social. Oleh karena konteks dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat, maka yang dibahas adalah perilaku anggota masyarakat dalam

memilih calon Legislatif. Perilaku politik pemilih dapat dikaji dalam proses partisipasi masyarakat dalam memilih. Hubungan antara pengetahuan politik dan tindakan politik, termasuk bagaimana kecakapan politik diperoleh, dan bagaimana cara orang menyadari sebuah kejadian politik. Pemikiran seperti ini biasanya menciptakan pola-pola tingkah laku yang penuh makna (Apter, 1996 dalam buku Upe: 2008).

Sehingga teori tindakan berhubungan dengan Max Weber. Teori tindakan sosial adalah tindakan manusia berkaitan dengan orang lain (*Sosial Action*). Suatu tindakan dianggap sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain. Dalam kajian sosiologi, pengertian tindakan sosial dipengaruhi oleh Max Weber yang dikutip oleh G. Ritzer (1992) mengartikan sebuah tindakan sosial sebagai tindakan manusia yang dapat mempengaruhi individu-individu dalam masyarakat (Ritzer George, 2013: 136).

Tindakan sosial yang dimaksud Weber merupakan sebuah tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja akibat dari pengaruh situasi yang sama. Weber menempatkan individu sebagai makhluk yang kreatif, bertindak sesuai dengan keinginan dan tujuan yang hendak dicapainya. (Ritzer George, 2011: 38).

Bertolak dari konsep dasar tentang tindakan dan hubungan sosial Weber menggunakan *lima* ciri pokok yang terjadi yang menjadikan sasaran sosiologi sebagai penelitian yaitu:

1. Tindakan manusia, yang menurut actor mengandung makna yang subjektif meliputi tindakan yang nyata.
2. Tindakan nyata yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subjektif.
3. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu keadaan, tindakan yang sengaja diulangi serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam.
4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang dan terarah ke pada orang lain.

Teori tindakan sosial Marx Weber metode yang dikembangkan sebagai varsetehen, karena sosiologi juga adalah manusia, mengapresiasi lingkungan sosial dimana mereka berada, memperhatikan tujuan-tujuan warga masyarakat yang bersangkutan dan oleh sebab itu berupaya memahami tindakan mereka.

Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan social yang memiliki arti-
arti subjektif atau mudah dipahami tersebut kedalam empat tipe :

1. Tindakan Rasional Istrumental

Dalam tindakan ini aktor menilai cara yang baik untuk mencapai tujuan tapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Misalnya aktor mendengar atau menilai para calon Legislatif dalam berkampanye.

2. Tindakan Rasional Berorientasi Nilai.

Aktor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu merupakan yang paling tepat atau lebih tepat untuk mencapai tujuan yang lain. Pelaku hanya beranggapan bahwa yang paling penting tindakan itu termasuk

dalam kriteria baik dan benar menurut ukura dan penilaian masyarakat sekitar.

3. Tindakan Tradisional

Tindakan ini merupakan tindakan yang bersifat rasional, seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu dalam tujuan dan cara yang digunakan.

4. Tindakan Efektif

Tindakan ini dilakukan seseorang berdasarkan perasaan yang dimilikinya, biasanya timbul secara spontan karena mengalami suatu kejadian yang sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa perhitungan dan pertimbangan yang matang. (George Ritzer, 2011: 39).

1.6.2 Konsep Sosiologi Politik

Pentingnya sosiologi dalam politik, karena sangat berkaitan pencapaian dan mempertahankan kekuasaan yang melibatkan kelompok untuk mempengaruhi atau memaksa agar mendapatkan apa yang menjadi tujuan, atau menjadi acuan teoritis dan metodologi sosiologi dan ilmu politik.

Skema konsep sosiologi dilandaskan pada empat konsep yaitu sosialisasi politik, partisipasi politik, penerimaan atau perekrutan politik, dan komunikasi politik. Semua konsep itu saling berhubungan satu sama lain yang sangat mengikat. (Michael Rush, 1971: 15).

1.6.2.1 Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah suatu proses yang melalui norma-norma dan nilai-nilai, dari suatu generasi ke generasi berikutnya, artinya sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya politik(*political culture*) suatu bangsa (Budiarjo:2008). Sosialisasi politik merupakan cara paling penting dari pada sistem-sistem sosial yang lain, karena proses seorang individu bisa memahami sistem politik, yang kemudian menentukan sifat-sifat persepsi politik dan permasalahannya.

Suatu definisi yang dirumuskan oleh seorang ahli sosiologi M.Rush (1992):

Sosialisasi politik adalah proses yang melaluhinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenai sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik (*political socialization may be define is the political system and which individuals in a given society become acquainted with the political systeem and which to certain degree determines their perception and their reaction to political phenomena*).

Sosialisasi berjalan seumur hidup dari lahir sampai tua akan selalu berkembang, melalui bangku pendidikan, keluarga, organisasi, agama maupun non agama, dan partai politik, Disinilah partai menjadikan sarana sosialisasi ke dalam masyarakat melaui media, ceramah agama, dan seminar. Sosialisasi partai juga menciptakan generasi baru yang mampu memperjuangkan kepentingan umum, dengan tujuan menguasai kekuasaan dalam pemerintah (Miriam Budiaerjo, 2008: 407). Dengan demikian, seseorang individu itu akan dapat mempelajari hal yang berkaitan dengan politik melalui agen-agen tersebut.

Selain itu, Roberts menerangkan sosialisasi politik sebagai satu proses pembelajaran yang membedahkan mereka kepada orientasi-orientasi kepercayaan, perasaan dan komponen nilai terhadap kerajaan dan kehidupan berpolitik. Orientasi tersebut juga melibatkan konsep-konsep autoriti, demokrasi dan tanggung jawab politik. Fungsi utama dalam sosialisasi politik adalah mendidik kader anggotanya dalam bertanggung jawab menepatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan umum.

1.6.2.2 Partisipasi politik

Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai tingkat tertentu. Sedangkan Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam karya penelitiannya *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, mengatakan bahwa partisipasi yang bersifat *mobilized* (dipaksa) juga termasuk ke dalam kajian partisipasi politik. Partisipasi sukarela dan mobilisasi hanya dalam aspek prinsip, bukan kenyataan tindakan. Intinya baik sukarela ataupun dipaksa, warga negara tetap melakukan partisipasi politik.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) (Miriam Budiarjo, 1994: 183). Berupa kegiatan individu atau kelompok yang bertujuan ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dan memilih pimpinan publik atau mempengaruhi kebijakan publik dalam mengambil keputusan dalam pemerintahan.

Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya sesuai dengan istilah partisipasi, (politik) berarti keikutsertaan warga Negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Ramlan Surbakti, 1992: 140-141).

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat. Pentingnya partisipasi politik dalam pemilu, merupakan perwujudan dari demokrasi. Partisipasi merupakan syarat mutlak dalam era demokrasi dan menjadi kebiasaan.

Partisipasi menurut sifatnya dibagi menjadi 2 yaitu sukarela (otonom) dan desakan orang lain (mobilisasi). Nelsom membagi 2 untuk mobilisasi yang dinamakan *autonomous participation* (partisipasi otonom) dan *mobilized participation* (partisipasi yang dimobilisasi). Pemberian suara dalam pemilu merupakan salah satu wujud partisipasi dalam politik yang terbiasa. Kegiatan ini, meskipun cuma pemberian suara, namun juga menyangkut semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja dalam membantu pemilihan, membantu tempat pemungutan suara. (Sastroatmodjo, 1995: 77) <http://www.akar.or.id>.

1.6.2.3 Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik yaitu proses dengan mana individu-individu menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan, dimana merupakan proses dua

arah yang bisa bersifat formal maupun informal. Rekrutmen kader-kader berkualitas adalah sebagai upaya mengembangkan kader pemimpin politik dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon di kursi pemerintahan (Michael Rush: 1971).

Sarana rekrutmen politik juga memperluas atau memperbanyak anggota, dengan cara mendidik dan membangun organisasi di dalamnya, agar bisa menjangkau dan melatih calon-calon pemimpin berkualitas. Sarana rekrutmen sebagai sarana untuk kepentingan internal, setiap partai butuh kader-kader yang dapat menjadikan kesempatan dalam menduduki kekuasaan di pemerintahan. Partai juga berkesempatan memperluas atau memperbanyak anggotanya.

1.6.2.4 Komunikasi politik

Banyaknya ragam pendapat atau aspirasi yang ada di masyarakat yang bisa ditampung dan dibangun sehingga komunikasi politik dibangun di tengah-tengah masyarakat. Sarana ini menampung aspirasi masyarakat atau kelompok agar sampai ke pemerintahan. Komunikasi politik sebagai proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik.

1.7 Landasan konseptual

1.7.1 Perilaku Pemilih

Perilaku memilih merupakan penyebab orang atau seseorang memilih suatu partai atau kandidat yang ikut dalam kontestasi. Secara umum, studi mengenai perilaku pemilih di negara demokratis, dapat dibagi ke dua kelompok, yaitu pendekatan psikologis dan sosiologis. Model psikologis menyatakan perilaku politik

para pemilih merupakan cerminan dari tanggapan mereka terhadap berbagai rangsangan atau pun tekanan psikologis ini melihat bahwa pada dasarnya pilihan politik seseorang bisa mengalami pergeseran yang mendasar dari waktu, bergantung pada stimulan pada yang merangsang atau menekan dalam jangka dekat. Bisa jadi, pada waktu seseorang menjadi pemilih pemula, identifikasi kepartaian seseorang lebih merujuk kepemilih orang tuanya, tetapi berubah saat dewasa.

Salah satu wujud dari perilaku sosial dalam kehidupan adalah perilaku politik sebagai perilaku yang bersangkutan paut dengan proses politik. Sedangkan politik adalah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dalam pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama (Subakti: 1992). Model sosiologis mengkaji berdasar hirarki status dengan masyarakat adalah sebuah sistem yang berjenjang. Perilaku politik seseorang sangat ditentukan posisi dan kelas sosialnya. Masalahnya posisi laki-laki atau perempuan, tua muda, termasuk dalamnya ialah tergabung dalam kelompok apa, misalnya agama, ideology, posisi di masyarakat dan bidang pekerjaan. Dan oposisi dalam keluarga. singkat kata, pendekatan sosiologis berasumsi bahwa kecenderungan aspirasi atau pilihan politik seseorang dipengaruhi kedudukannya di masyarakat.

Berdasarkan pendekatan tipologi, pemilih (*voters*) dapat dikelompokkan ke empat golongan, yaitu

1. Pemilih rasional (*rational voter*), pemilih yang punya perhatian tinggi terhadap program kerja partai politik (parpol) atau kontestan pemilu. Ia melihat kinerja di masa lalu (*backward looking*) dan tawaran program untuk

menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi (*forward looking*). Pemilih rasional tidak begitu mementingkan ideologi parpol/kontestan. Faktor seperti asas, asal usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan, tetapi tidak signifikan buat mereka. Pemilih jenis itu sangat mudah berganti-ganti pilihan.

2. Pemilih kritis (*critical voter*), yang *concern* pada program kerja parpol/kontestan. Namun, dalam melihat program kerja itu mereka menggunakan paradigma sistem nilai yang mereka yakini. Program kerja parpol atau capres tidak saja harus sesuai dengan ekspektasi dan permasalahan yang mereka hadapi, tetapi juga harus selaras dengan ideologi atau sistem nilai mereka. Menurut Downs, pemilih akan cenderung memberikan suara mereka kepada parpol atau kontestan yang menawarkan suatu program yang memiliki kesamaan (*similarity*) dan kedekatan (*proximity*) dengan sistem nilai dan keyakinan mereka.
3. Pemilih tradisional (*traditional voter*), adalah pemilih yang memiliki orientasi ideologi dan sistem keyakinan sangat tinggi. Pemilih jenis itu sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai (*values*), asal usul (*primordial*), agama, dan paham sebagai ukuran untuk memilih parpol atau capres dalam pemilu. Mayoritas konstituen PKB dan PDIP dapat dikategorikan ke tipologi pemilih tradisional
4. Pemilih skeptis (*skeptic voter*). Pemilih yang tidak memiliki orientasi baik kepada ideologi atau sistem nilai dan program kerja yang ditawarkan.

Mereka ialah kelompok masyarakat yang skeptis terhadap pemilu. Di mata mereka, parpol atau capres yang menang pemilu tidak akan mengubah keadaan (Wibawanto, 2005: 137-144).

1.7.2 Perilaku Politik

Perilaku politik merupakan metodologi dari Weber adalah konsep mengenai pemahaman simpatis atau yang di aplikasikan pada sosiologi. Tingkah laku manusia itu akan mudah dipahami apabila orang ikut memperhitungkan maksud-maksud mereka yang langsung terlibat dalam pelaksanaan tingkah laku (Wrong, 2003: 31).

Keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam kehidupan seseorang, sehingga menjadi lembaga yang pertama kali membentuk kepribadian serta perilaku anak sejak dini. Di lingkungan keluarga orang tua berperan mengajarkan anaknya untuk mengenal masyarakat, bangsa, Negara, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat sekitar. Pendidikan politik melalui lembaga pendidikan mempunyai misi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, keterampilan, sikap, dan nilai bagi anak. Di lembaga pendidikan yang merupakan bentuk masyarakat kecil terdapat jaringan kerja dari sejumlah komponen yang saling terkait, seperti guru, siswa, kepala sekolah, administrasi sekolah, dan supervisor (Ramlan Surbakti, 1999: 143).

Pendidikan politik melalui media massa dalam kehidupan moderen ini sangat cepat pengaruhnya terhadap tingkah laku masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung. Media massa seperti radio, TV, surat kabar maupun dunia internet

merupakan media yang sumber informasi dalam bidang politik sangat menjangkau atau mempengaruhi perilaku politik yang ada di masyarakat.

Pendidikan politik sangat penting terjadinya pengembangan bakat dan kemampuan setiap individu dan melaksanakan fungsi politik dan melaksanakan fungsi politiknya sendiri sesuai dengan status dan misi hidup masing-masing. Pendidikan politik secara implisit mengandung perbuatan atau aksi politik yaitu berupa partisipasi politik dan menjalankan secara nyata dalam proses politik. Dengan proses belajar individu memberikan bentuk sebuah tindakan atau perilaku politik yang demokrasi dari segi kehidupan maupun demokrasi dalam struktur-struktur sosial dan politik (Kartono, 2009: 82-83).

Tingkah laku seseorang dalam berteman yang lebih mengedepankan unsur normative dari pada unsur pribadi yang sangat mempengaruhi suatu tindakan yang akan dilakukan. Sangat efektif perilaku politik itu disebabkan oleh teman lingkungan, yang merupakan suatu interaksi yang dilakukan setiap hari sehingga teman atau lingkungan sangat berperan aktif dalam suatu keputusan atau suatu tindakan.

1.7.3 Politik

Asal mula kata politik berasal dari “*polis*” yang berarti Negara atau Kota. Politik berasal dari kata Yunani *polis* yang berarti kota atau negara kota, kemudian arti itu berkembang menjadi *polites* yang berarti warga negara, *politeia* yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, *politika* yang berarti pemerintahan negara dan *politikos* yang berarti kewarganegaraan, dengan politik berarti ada hubungan

khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan, dan akhirnya kekuasaan.

Politik juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaruh konflik yang menjadi konsensus nasional, serta kemudian kekuatan masa rakyat. dengan politik berarti ada suatu hubungan manusia, dari hubungan itu akan muncul kewenangan dan kekuasaan dan pengatur konflik (Syafiie, 2002: 6). Politik yang berarti pemerintahan negara dan politikus yang berarti kewarganegaraan. Dengan demikian, politik berarti urusan Negara atau pemerintahan. Secara konsep, kata politik itu sendiri masih berhubungan dengan kata polisi. Jadi politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan distribusi kemakmuran.

Pengertian politik menurut Prof. Miriam Budiardjo adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan dan fungsi politik. Dari fungsinya politik mempunyai struktur dari masyarakat sampai tingkat pemerintah sehingga politik bisa dikatakan sebuah sistem yang terstruktur dari pemerintah sampai ke rakyat

1.7.4 Partai Politik

Partai politik merupakan manusia yang terorganisir yang terkontrol dengan tujuan merebut kekuasaan yang ada di pemerintahan yang akan memberikan manfaat bagi anggotanya. (Crl Friedrich: 1967). Partai politik sebagai penyalur suara rakyat

dan untuk menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat itu juga bisa dikatakan partai politik.

Menurut UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara umum partai politik adalah sesuatu organisasi yang dibentuk oleh kelompok, mempunyai tujuan, cita-cita, dan ideologi tertentu, dan berusaha mencari kekuasaan dengan pemilihan umum. Fungsi partai politik menjadi wahana bagi warga bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara.

1.7.5 Masyarakat

Menurut kamus Bahasa Indonesia masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yg mereka anggap sama. Masyarakat mempunyai arti sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal didalam satu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.

Masyarakat juga sering dikenal dengan istilah *society* yang berarti sekumpulan orang yang membentuk sistem, yang terjadi komunikasi didalam

kelompok tersebut. Kata *society* berasal dari bahasa latin, *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman, sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama. Obyek Studi sosiologi pada dasarnya adalah masyarakat itu sendiri. Pengertian-pengertian tentang masyarakat yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini dapat kita temukan dalam Soerjono Soekanto (2006) dalam bukunya yang berjudul Sosiologi, Suatu Pengantar.

Istilah *Communit* dapat di artikan “masyarakat setempat” yang menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa, sehingga dapat disimpulkan masyarakat adalah suatu wilayah kehidupan social yang ditandai oleh suatu derajat hubungannya social yang tertentu (Soekanto, 2012: 133).

1.7.6 Desa

Pengertian Desa menurut kamus Bahasa Indonesia adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatua.

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di Negeri ini. Luas wilayah Desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, maka biasanya hubungan kekerabatan antar masyarakatnya terjalin kuat. Para masyarakatnya juga

masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka.

Pengertian Desa menurut UU.No 5 Tahun 1979, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah setiap pemukiman para petani (peasant) sebenarnya faktor pertanian bukanlah ciri yang harus terlekat pada setiap Desa. Ciri utama yang terlekat pada desa ditandai oleh keterkaitan warganya terhadap suatu wilayah tertentu. Keterkaitan terhadap wilayah ini di samping terutama untuk tempat tinggal, juga untuk menyangga kehidupan mereka” (Rahardjo, 1999: 29). Menurut pendapat di atas, setiap pemukiman petani merupakan faktor pertanian dan bukanlah ciri-ciri yang melekat pada Desa, sebenarnya ciri utama yang melekat pada Desa ditandai adanya keterikatan warga masyarakat terhadap wilayahnya yang menjadi tempat tinggal dan mata pencaharian mereka.

1.7.7 PILEG

Pileg adalah Pemilihan legislatif, pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali.

Pemilihan legislatif sendiri di Indonesia telah dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009 dan yang keempat akan terjadi pada tahun 2014 dan pemilihan ini akan memutuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 33 provinsi dan 497 kota.

1.8 Metode penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif sesuai dengan definisinya bahwa penelitian harus terjun ke lapangan dengan melakukan wawancara mendalam demi mendapatkan data yang seluas-luasnya sebagai upaya menggambarkan rumusan masalah yang peneliti angkat, dengan metode inilah peneliti akan lebih leluasa menggali informasi dan memahami kondisi suatu masyarakat dalam berperilaku pemilih politik masyarakat Desa Wanar Pucuk Kabupaten Lamongan dalam pemilihan Legislatif (PILEG) 2014.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Metode penelitian ini dibangun dengan berdasar pada pemikiran pokok yang menepatkan realitas social sebagai hasil dari bekerjanya proses interpretif individu atas struktur yang didalamnya melibatkan berbagai proses pemaknaan subjektif dan inter-subjektif. Oleh karenanya factor kedalaman (*depth*), kekayaan (*richnes*) dan kompleksitas (*complexcity*) atau sebuah makna sangat diperlukan (Moleong, 2010: 50).

Dalam penelitian kualitatif di gunakan rancangan penelitian deskriptif, yaitu peneliti yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, artinya peneliti perlu menyajikan data secara otomatis sekaligus juga perlu menganalisis dan menginterpretasi data-data yang dimaksud. Metode ini sengaja peneliti gunakan, karena disamping nantinya diharapkan memperoleh data deskriptif obyektif, penelitian juga menginginkan bahwa data tersebut bersumber pada subjek penelitian yang diamati dengan tidak menafikan fenomena-fenomena yang berkembang.

Dengan menggunakan metode ini diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam tentang perilaku politik masyarakat Desa Tulung Wanar Pucuk Kabupaten Lamongan dalam Pileg 2014.

Dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrument penting yang berusaha mengungkapkan data secara mendalam yang dibantu oleh data-data lain. (Moleong, 2010: 123). Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan antar individu, artinya penulis mengadakan kontak atau hubungan antar masyarakat sekitar lokasi peneliti. Dengan demikian peneliti lebih leluasa mencari informan dan mendapatkan data yang valid yang diperlukan untuk kepentingan penelitian.

1.8.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pemilihan data primer dan sekunder.

1.8.2.1 Data Sekunder

Data sekunder ini didapatkan dari berbagai macam usaha yang dilakukan, mulai dari mencari referensi-referensi data mengenai pemilu dengan berbagai permasalahannya, yang berhasil didapatkan melalui browsing internet, mencari dan mendapatkan buku yang sesuai dengan tema penelitian, hingga mencari literatur-literatur skripsi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dilakukan oleh orang lain. Metode penelitian semacam ini dirasa sangat bermanfaat karena dapat memberikan tambahan pengetahuan yang mungkin sebelumnya belum pernah didapatkan.

1.8.2.2 Data Primer

Data primer adalah data yang dari sumber utamanya wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya dimana di Antara kegiatan yang dominan, jelas akan bervariasi.

Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informan langsung tentang perilaku Pemilih dalam Pemilihan legislatif (PILEG) 2014. Sumber data primer dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara dengan kriteria yang sudah ditentukan.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam mengenai permasalahan yang diteliti proses pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan teknik observasi (observation), dan wawancara (indepth interview).

1. Pengamatan (observasi)

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi, adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah, untuk menyajikan gambaran realistic perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi.

Observasi dalam penelitian ini, hanya digunakan untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dari wawancara. Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai pengacu pada konsep observasi (Moleong: 2010)

2. Wawancara

Wawancara dengan menggunakan pedoman (*interview guide*) menjadi teknik pengumpulan data primer pertama terhadap informan yang dipilih. Wawancara yang akan dilakukan lebih menyerupai suatu bentuk dialog Antara peneliti dan informan. Dalam hal ini, informan dipandang sebagai individu yang aktif, dimana pandangan, perasaan, kerjasamanya dianggap sebagai bagian penting dalam penelitian ini. (Burhan Bungin, 2003: 131).

Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam dapat dilakukan dalam dua acara, yaitu *pertama*, wawancara sebagai strategi dalam pengumpulan data, pada konteks ini catatan data lapangan yang diperoleh berupa transkrip wawancara. *Kedua*, wawancara sebagai teknik lain, dalam pengumpulan data, sebagai analisis dokumen dan studi literatur.

Berdasarkan hal ini, peneliti harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, disesuaikan dengan keadaan dan ciri responden yang unik. Dalam hal ini peneliti harus penuh perhatian terhadap apa yang diungkapkan, berusaha bertanya secara rinci dalam inti permasalahan, dan peneliti berusaha menghubungkan hasil wawancara melalui persiapan pertanyaan peneliti yang direncanakan ini diharapkan dalam merespon pertanyaan responden lebih bebas dan terbuka, sehingga pertanyaan yang diajukan bisa mengalir seperti percakapan setiap hari.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data dan mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, agenda dan pengambilan foto-foto. (Sugiyono, 2010: 331). Dokumentasi yaitu proses pengambilan data dengan melihat dokumen-dokumen yang ada di tempat penelitian atau sering disebut juga dengan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Adapun data ini meliputi data pemilih tetap.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa deskriptif, artinya data-data yang diperoleh (primer-sekuder) dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan dianalisa secara kualitatif dengan pedoman pada kerangka pemikiran yang jelas kondisi kehidupan, tantangan perilaku politik masyarakat Desa Wanar Pucuk Lamongan dalam pemilihan legislatif (PILEG) 2014.

Analisa data yang dilakukan metode Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari tiga jalur kegiatan yakni reduksi data, pengujian data, dan penarikan kesimpulan yang ketiganya dilakukan dalam suatu proses yang terjadi. Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan sebelum, dan sesudah proses penelitian lapangan (Moleong, 2010: 307).

1. Reduksi data (*Reduksi Data*)

Merupakan proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan. Dengan demikian data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih jelas. Data reduksi dimulai sejak penelitian mengambil keputusan untuk memilih kasus, pertanyaan yang diajukan dan tentang cara pengumpulan data yang dipakai

2. Penyajian data (*Data Display*)

Menyajikan informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya atau mengorganisasikan data dalam bentuk cerita agar dapat diambil kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*)

Proses pengambilan kesimpulan dari hasil proses.

1.8.5 Keabsahan Data

Untuk mejamin kredibilitas data dari kemungkinan-kemungkinan kesalahan analisa dan interpretasi terhadap data, peneliti menggunakan strategi Triangulasi.

Adapun strategi trigulasi yang digunakan adalah (dalam Moleong. 1995),

1. Triangulasi dengan sumber: pemeriksaan dilakukan dengan mengecek kembali dari sumber-sumber berdasarkan hasil data yang diperoleh baik bentuknya primer maupun sekunder dalam penelitian.
2. Triangulasi dengan metode: pemeriksaan yang dilakukan dengan mengecek kembali metode yang digunakan dalam penelitian.
3. Triangulasi dengan teori: pemeriksaan yang dilakukan dengan mengecek kembali kesesuaian Antara teori yang diunakan dalam peneltian.
4. Triangulasi dengan penyidik: pemanfaatan dan pengamatan lainnya untuk keperluan *re-chek* (Maleong, 2010: 330).

Dari beberapa macam triangulasi diatas tersebut, peneliti mengambil jenis trigulasi sumber yang lebih sesuai dan menurut kemampuan peneliti. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data, yakni dengan membandingkan Antara data dari hasil pengamatan dengan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat Desa Wanar.

1.8.6 Teknik Pengambilan Informan

Teknik pengambilan informan atau subjek yang telah memberikan berbagai macam informan yang diperlukan dalam proses penelitian. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Wanar Pucuk Kabupaten Lamongan dalam pemilihan

Legislasi (PILEG) 2014. Penelitian informan dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive sampling). Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2005: 96). Pemilihan informan yang bisa mewakili dari setiap kelompok masyarakat yang ada di Desa Wanar Pada penelitian ini, peneliti menentukan informan yaitu:

1. Birokrat Desa

- a) Kepala desa
- b) Kepala Dusun
- c) Kepala RW
- d) Kepala RT
- e) Tokoh masyarakat

2. Masyarakat

- a) Perempuan berpendidikan tinggi
- b) Perempuan berpendidikan rendah
- c) Laki-laki berpendidikan tinggi
- d) Laki-laki berpendidikan rendah

3. Masyarakat Swasta

- a) pengusaha
- b) karyawan kantor
- c) pedagang
- d) tenaga pengajar

1.8.7 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian peneliti, terletak di Deasa Wanar Kecamatan Pucuk kabupaten Lamongan. Kareana peneliti melihat banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam Pemilihan Legislatif (PILEG) 2014.

Penelitian ini dilakukan 9 tahap dari pengajuan Proposal. Bulan pertama turun lapangan melihat keadaan masyarakat disekitarnya ditambah mencari orang yang bisa dijadikan suatu petunjuk dalam proses penelitian.

No	Kegiatan	Tahun 2014-2015											
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun					
1	Mempersiapkan												
	bahan untuk												
	proposal/observasi												
	awal												
2	Proses penyusunan												
	proposal/observasi												
3	Bimbingan proposal												
4	Seminar proposal												
5	Persiapan skripsi/												
	terjun lapangan												
6	Bimbingan dan												
	skripsi												
7	Persiapan sidang												
8	Sidang Skripsi												
9	Revisi sidang												
10	Pembukuan												